
Demokrasi Dalam Menciptakan Pemilu Bersih di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

Rachmawati Machriful

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: rachmawatimachriful28@gmail.com

Rani Yohana Wati

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: raniyohanawati@gmail.com

Fitria Aneta

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: ftriaaneta@gmail.com

Nola Nursita Erindra

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: nolanursita@gmail.com

Mahlil Adriaman

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: mahliladriaman@gmail.com

Abstract

Elections are one of the pillars of democracy that enable the realization of the people's right to determine their own destiny in order to form a democratic government. Through the active participation of students, the election guard movement aims to prevent manipulation and fraud, as well as ensure that the votes of each voter are respected and counted correctly. By overseeing the implementation of general elections, the aim is to create a transparent, fair and accountable environment. As for data collection techniques through observation and interviews in an effort to create clean elections, the community in Mungka District may face several obstacles. One of them is the low level of education and political awareness in several regions. This can leave society vulnerable to manipulation and abuse by irresponsible parties. Therefore, voter education and outreach about the importance of clean elections need to be a priority. Apart from that, economic factors can also be an obstacle for society in creating clean elections. The practice of money politics and misuse of resources in campaigns often occurs in environments with high levels of poverty. Effective voter education about their rights, the electoral process, and the importance of fair participation can help reduce election abuses. Socialization of anti-corruption programs and transparency in elections is also important to encourage responsible participation from all parties.

Keywords—Democracy, Education, Election, Money Politic

1. PENDAHULUAN

Pemilu telah menjadi arus utama di negara-negara modern. Pemilu didasarkan pada asas kesetaraan yang artinya setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan, sehingga setiap warga negara sebenarnya mempunyai hak yang sama untuk memerintah. Kekuasaan kerakyatan inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. (Alvons, 2018)

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang memungkinkan terwujudnya hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri guna membentuk pemerintahan yang demokratis. Dengan adanya pemilu ini diharapkan pemerintah akan mencapai tonggak sejarah demokrasi, dimana masyarakat secara langsung dan aktif berpartisipasi dalam menentukan arah politik dan kebijakan pada periode pemerintahan berikutnya. pemilu tentu saja sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik warga negara tersebut. Kesadaran politik tersebut diwujudkan dalam partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam menentukan pemerintahan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif serta pengambil keputusan. Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang dapat memilih dan dipilih dalam pemilu. Memilih dan dipilih merupakan hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, kepatuhan ini diatur oleh undang-undang sebagai aturan yang sah, sehingga setiap orang dapat menaati aturan tersebut. Memilih sebagai hak politik cukup membangkitkan antusiasme masyarakat, khususnya di Indonesia. Mulai dari pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara, mereka selalu terikat dengan kandidat yang ingin mereka pilih. Selain itu, seringkali mereka memberikan dukungan materiil dan nonmateriil hanya karena ingin melihat calon yang mereka dukung memenangkan perlombaan politik. Karena semangat dan fanatismenya, perdebatan politik seringkali berakhir dengan kerusuhan. (Jurdi, 2018)

Pemilu bisa menjadi titik awal perubahan ke arah yang lebih baik, namun Partai Demokrat ini juga bisa menjadi pemicu kehancuran suatu bangsa. Pemilu yang baik menghasilkan pejabat yang baik, dan sebaliknya. Bagi negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar yang menunjang kelangsungan hidup negara. Meningkatnya pembelian suara dan kebijakan moneter sangat mengkhawatirkan masa depan demokrasi. (Kenyataan, 2014)

Pemilu, erat kaitannya dengan partai politik dan pergantian pemimpin negara atau daerah. Berikut ini kami jelaskan pengertian pilihan menurut berbagai penulis. Menurut Uu Nurul Huda, pemilu adalah suatu cara atau sarana untuk mengidentifikasi orang-orang yang mewakili orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan pemerintahan (dalam arti luas). Sehingga pemilu merupakan sebuah kesempatan dalam sistem demokrasi untuk memilih anggota parlemen hingga lembaga perwakilan publik, dan juga merupakan cara untuk mewujudkan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang politik. Pemilu diselenggarakan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Karena tidak mungkin rakyat memerintah secara langsung. Oleh karena itu kita memerlukan kesempatan untuk memilih anggota parlemen untuk memerintah negara dalam jangka waktu tertentu. (Sholahuddin & Bariah, n.d.)

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu), baik dengan sistem pemerintahan otoriter maupun demokratis. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Banyak pihak menilai pemilu 1955 diselenggarakan secara demokratis. Pemilu tahun 1955 kemudian melahirkan sistem politik yang populer dengan sebutan “masa demokrasi parlementer” atau “masa demokrasi liberal”. Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun (1966-1998) dan pada dasarnya merupakan rezim otoriter yang mendominasi sistem politik dan pemerintahan. Pemerintahan Orde Baru menyelenggarakan pemilu parlemen pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun pelaksanaan pemilu tersebut masih jauh dari nilai-nilai demokrasi. Penjadwalan, intimidasi, kurangnya diskusi dan kesenjangan partisipasi pemilih menjadi bagian dari sifat penyelenggaraan pemilu pada masa Orde Baru. Pemilu pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah Orde Baru berlangsung pada tahun 1971, dengan partisipasi 10 partai politik. Namun setelah itu, pemerintah menerapkan kebijakan fusi partai pada tahun 1973 sehingga memaksa partai-partai berideologi Islam untuk bergabung dengan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Pada saat yang sama, partai-partai berideologi nasionalis dan Kristen bergabung dengan PDI (Partai Demokrasi Indonesia). (*Tata kelola pemilu di Indonesia*, 2019)

Keberhasilan pemilu tentu saja sangat dipengaruhi oleh kesadaran politik warga negara. Kesadaran politik tersebut tercermin dari partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memilih dan mendukung pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif. Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menjadi cara masyarakat memantau tindakan pemerintahan terpilih. Masyarakat mempunyai hak untuk memutuskan dan mendelegasikan amanahnya kepada partai politik yang layak dan dapat dipercaya sebagai pemimpin masa depan. Selain itu, partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat eksistensi seseorang atau masyarakat. kelompok sosial yang mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik. (Pratama Putri, 2016)

Melalui pemilu ini, diharapkan pemerintah dapat mencapai tonggak sejarah demokrasi, dimana masyarakat akan berpartisipasi secara langsung dan aktif dalam pembentukan arah politik dan kebijakan negara pada periode pemerintahan berikutnya. Tentu saja pemilu sangat dipengaruhi oleh kesadaran politik warga negaranya. Kesadaran politik tersebut diwujudkan dalam partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, sehingga memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk mendukung pengangkatan pengambil keputusan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif. (Bestari, 2018)

Menurut (Sunny, 1984) berpendapat bahwa pemilu merupakan institusi yang sangat penting bagi keamanan dan demokrasi. Pemilihan buku berarti bahwa, dalam jangka waktu tertentu, masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan keinginannya mengenai kebijakan-kebijakan yang harus diakui oleh negara dan masyarakat, serta orang-orang yang harus melaksanakan kebijakan tersebut.

Politik uang adalah upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang dan layanan pemungutan suara bagi pemilih tidak dapat dibatalkan. (“Pendidikan Dan Pemberantasan Korupsi,” n.d.), Kebijakan moneter, jual beli suara, pada hakikatnya adalah pembelian kedaulatan rakyat, apalagi penerima uang justru meminjam kedaulatannya untuk jangka waktu tertentu. Jika kita menyerahkan

hak menentukan nasib sendiri kepada pihak yang berwenang, maka secara prinsip kita tidak bisa mengambil kembali hak menentukan nasib sendiri tersebut, paling tidak kita tidak mempunyai hak untuk menuntut pihak yang berwenang mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan kita, karena kita sudah mendapat ganti rugi. karena legitimasi yang diberikan kepada mereka (penguasa). (*Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 2021)

Berdasarkan gambaran diatas penulis tertarik melakukan pengamatan secara langsung di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota terkait Apa saja kendala Masyarakat dalam menciptakan pemilu bersih dan Bagaimana cara menciptakan Pemilu Bersih di kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan Kawal Pemilu Bersih yang bertujuan untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi lokal. Melalui partisipasi aktif Mahasiswa, gerakan kawal pemilu bertujuan untuk mencegah manipulasi dan kecurangan, serta memastikan bahwa suara setiap pemilih dihormati dan dihitung dengan benar. Dengan mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang transparan, adil, dan akuntabel. Kawal pemilu juga berperan dalam memberikan pendidikan pemilih, meningkatkan kesadaran akan hak-hak demokratis, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik lokal.

2. METODE

Artikel ini menggunakan metode Kualitatif dengan Teknik Deskriptif Analitis. Adapun Teknik pengumpulan datanya melalui Observasi dan Wawancara untuk mengungkap kebijakan, praktik, dan isu-isu yang mempengaruhi kecurangan Pemilu. Sumber pokoknya adalah Buku Literatur, jurnal serta laporan yang memuat konten hasil Pemantauan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif analitis tentang gerakan kawal pemilu bersih di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana gerakan tersebut beroperasi dan dampaknya terhadap proses pemilu di wilayah tersebut. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan integritas pemilu dan partisipasi politik yang bersih di tingkat lokal.



Gambar 1 Pengabdian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Gubernur, presiden dan wakil presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Gubernur, yang diterapkan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (*UU No.7 Tahun 2017 (2).Pdf*, n.d.). Pasal 22 E UUD 1945 ayat 5 berbunyi: "Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri".

Salah satu faktor terpenting dalam penyelenggaraan pemilu adalah partisipasi warga negara yang memilih dalam menggunakan haknya secara benar tanpa paksaan dan faktor negatif lainnya. Partisipasi dalam pemungutan suara diperlukan agar tidak ada hambatan bagi keberlanjutan demokrasi dan sistem politik. Pemilu sebagai alat utama demokrasimerupakan salah satu alat yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan amanah kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau penguasa yang duduk di Pemerintah. Tidak mengherankan jika pertanyaan mengenai tinggi rendahnya partisipasi berkaitan dengan tingkat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap wakil-wakilnya atau mereka yang diberi wewenang untuk memimpin pemerintahan dan membuat kebijakan. Sebagai bagian dari keberlanjutan demokrasi, jumlah pemilih juga mempengaruhi siapa yang memenangkan pemilu dan menguasai kehidupan banyak orang. Itu sebabnya beberapa negara demokrasi, termasuk Indonesia, menjadikan partisipasi sebagai agenda yang tidak bisa dikesampingkan dalam proses pemilu, terutama terkait dengan kehadiran warga negara dalam memilih. (Zitri et al., 2023)

Secara umum pemilu bermula dari konsep dan gagasan besar demokrasi yang mengacu pada John Locke dan Rousseau berarti menjamin kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu di segala bidang. Demokrasi memiliki nilai-nilai inklusif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan ditegakkan oleh warga negara dan instrumen negara melalui kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. (Aryani et al., 2024)

Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar berbagai jenis demokrasi, antara lain demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terkelola, demokrasi Pancasila, demokrasi kerakyatan, dan lain-lain. Semua istilah tersebut menggunakan istilah demokrasi, yang dalam asal katanya berarti "pemerintahan oleh rakyat" atau pemerintahan atau kekuasaan rakyat (*government or rule by the people*). (Budiarti, 2018)

Sejak masa reformasi di Indonesia pada tahun 1998, perubahan politik terjadi secara signifikan. Periode ini tidak hanya menandai berakhirnya pemerintahan otoriter Orde Baru yang dipimpin Soeharto, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan sistem politik dan struktur negara Indonesia. Amandemen ini tidak hanya mengubah cara hidup, tetapi juga mengubah sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia dengan amandemen UUD 1945 yang ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. "Atas dasar itulah maka UUD 1945 berlaku. jelas berdasarkan pada pemerintahan yang demokratis karena berdasarkan pada kedaulatan rakyat. (Cornelia et al., 2024)

Program kawal pemilu bersih yang dilakukan oleh Kelompok 11 KALIBER di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang adil dan menjaga kejujuran serta transparansi selama proses pemilihan. Melalui

serangkaian kegiatan, mulai dari sosialisasi, pemantauan, hingga evaluasi, kelompok ini berhasil mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemilihan umum mempunyai tiga tujuan dasar. Pertama, sebagai mekanisme pemilihan pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan publik. Kedua, pemilihan umum juga merupakan mekanisme pengalihan konflik kepentingan dari masyarakat ke keterwakilan rakyat melalui wakil-wakil terpilih dan partai politik peraih kursi, serta terus menjamin integrasi dan kohesi sosial. Ketiga, pemilihan umum merupakan sarana untuk menggalang, memobilisasi, dan memperoleh dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah melalui partisipasi dalam proses politik. (Jimly Asshiddiqie et al., 2014)

Kendala yang sering di hadapi oleh kelompok 11 kaliber dalam sosialisasi dan pengawalan pemilu pada masyarakat dalam menciptakan pemilu bersih di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

1. **Kurangnya Kesadaran:** Masyarakat mungkin tidak memiliki kesadaran yang tinggi terkait dengan pentingnya pemilu bersih, sehingga mereka tidak berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan
2. **Kurangnya Transparansi:** Pemilu mungkin tidak diawasi dengan transparansi yang tinggi, sehingga masyarakat tidak memiliki informasi yang jelas dan akurat terkait dengan pemilu
3. **Kurangnya Komitmen:** Pemilu mungkin tidak diawasi dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, sehingga masyarakat tidak memiliki kepastian bahwa pemilu akan dilakukan secara jujur dan adil
4. **Kurangnya Sanksi:** Pemilu mungkin tidak diawasi dengan sanksi yang jelas dan efektif, sehingga masyarakat tidak memiliki kepastian bahwa semua pihak yang melanggar aturan pemilu akan dikenakan sanksi yang sesuai
5. **Kurangnya Peran Pemimpin:** Pemimpin mungkin tidak berperan penting dalam menjaga integritas pemilu, sehingga masyarakat tidak memiliki kepastian bahwa pemimpin memiliki komitmen untuk menjaga integritas pemilu
6. **Kurangnya Peran Masyarakat:** Masyarakat mungkin tidak berperan penting dalam menjaga integritas pemilu, sehingga masyarakat tidak memiliki kepastian bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terkait dengan pentingnya pemilu bersih
7. **Kurangnya Peran Lembaga:** Lembaga mungkin tidak berperan penting dalam menjaga integritas pemilu, sehingga masyarakat tidak memiliki kepastian bahwa lembaga memiliki komitmen untuk menjaga integritas pemilu
8. **Kurangnya Peran Media:** Media mungkin tidak berperan penting dalam menjaga integritas pemilu, sehingga masyarakat tidak memiliki kepastian bahwa media memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait dengan pemilu

Partai politik yang lemah seringkali disalahkan atas gejolak politik di Indonesia. Partai-partai yang perlu memperoleh minimal 20% suara dalam pemilihan presiden untuk mengajukan kandidat non-koalisi harus melakukan upaya untuk memobilisasi dukungan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, di tingkat daerah, partai harus memperoleh setidaknya 15% suara untuk dapat dicalonkan dalam pemilihan parlemen. Artinya, para kandidat harus mengeluarkan uang untuk menggalang dukungan suara partainya. Berdasarkan informasi yang diterima melalui , dana yang disisihkan untuk pengangkatan pengurus daerah saja bisa mencapai antara 60 miliar hingga 100 miliar. Dana fantastis tidak setara dengan pendapatan perbulan seorang kepala daerah. (Bachtiar, 2014)

Partai politik merupakan landasan masyarakat demokratis. Mereka menyatukan kepentingan bersama, mengekspresikannya dalam bentuk pemilu politik dan membentuk struktur partisipasi politik. Selain itu, mereka melatih para pemimpin politik dan menyelenggarakan pemilu untuk mencoba mengendalikan lembaga-lembaga negara. Dalam kebanyakan kasus, partai memberikan dasar organisasi bagi pembentukan pemerintahan, dan dalam minoritas, partai menjadi oposisi atau alternatif terhadap pemerintah. Kandidat terpilih berusaha untuk memajukan kepentingan partainya di parlemen dan mewakili agenda politik tertentu yang memiliki legitimasi mandat pemilih populer. (Kelly & Ashiagbo, 2011)

Indonesia juga menjadi contoh bagi negara-negara di dunia, khususnya negara berkembang dan negara-negara Asia. Indonesia memainkan peran penting dalam demokrasi saat ini. Gagasan ketidaksesuaian Islam dan demokrasi tidak terbukti dalam kasus Indonesia. Selama ini budaya atau agama dianggap sebagai penghambat proses demokratisasi dan sistem politik di negara-negara Arab. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam berhasil menerapkan model demokrasi yang bahkan lebih baik dan demokratis dibandingkan negara-negara yang dianggap sebagai penggagas demokrasi. (Noviati, 2013)

Dibandingkan negara lain, Indonesia mempunyai fondasi yang kuat sebagai negara demokrasi. Fakta penting tersebut terdapat dalam sistem politik dan administrasi Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara republik perwakilan. Berbeda dengan Malaysia dan Thailand, misalnya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Konstitusi Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan kerangka hukum yang memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara terbatas. (Setyowati & Hariyati, 2022)

Menciptakan Pemilu Bersih dan apa saja kendala Masyarakat terhadap menciptakan pemilu bersih di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemilihan umum (Pemilu) yang bersih dan adil adalah fondasi utama bagi demokrasi yang sehat. Di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, upaya menciptakan pemilu bersih memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah setempat. Untuk menciptakan pemilu bersih di kawasan ini, serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh masyarakat dalam proses tersebut. Pertama-tama, kesadaran akan pentingnya pemilu bersih perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat. Pendidikan pemilih yang efektif tentang hak-hak mereka, proses pemilu, dan pentingnya partisipasi yang adil dapat membantu mengurangi pelanggaran pemilu. Sosialisasi program-program anti-korupsi dan transparansi

dalam pemilu juga penting untuk mendorong partisipasi yang bertanggung jawab dari semua pihak.

Selanjutnya, penguatan lembaga pengawas pemilu seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat sangat penting. Panwaslu yang independen dan kompeten dapat mengawasi tahapan-tahapan pemilu mulai dari proses pendaftaran pemilih, kampanye, hingga pencoblosan dan penghitungan suara. Keberadaan Panwaslu yang kuat dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik dapat membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Namun, dalam upaya menciptakan pemilu bersih, beberapa kendala mungkin dihadapi oleh masyarakat di Kecamatan Mungka. Salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran politik di beberapa wilayah. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat rentan terhadap manipulasi dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan pemilih dan sosialisasi tentang pentingnya pemilu bersih perlu menjadi prioritas.

Selain itu, faktor ekonomi juga dapat menjadi kendala bagi masyarakat dalam menciptakan pemilu bersih. Praktik politik uang dan penyalahgunaan sumber daya dalam kampanye seringkali terjadi di lingkungan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu, serta upaya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat agar tidak rentan terhadap praktek-praktek korupsi.

Dalam rangka menciptakan pemilu bersih di Kecamatan Mungka, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas pemilu, LSM, dan masyarakat sipil sangat diperlukan. Dengan kerjasama yang solid, diharapkan pemilu di kawasan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain tentang bagaimana sebuah proses demokratis yang transparan dan adil dapat terwujud. Untuk menciptakan pemilu bersih di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, beberapa langkah yang dapat diambil yaitu:

1. **Mengawal Pesta Demokrasi:** Masyarakat harus mengawal pesta demokrasi dengan cara mengawasi pelaksanaan pemilu secara langsung dan aktif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memantau proses pemilihan, memantau kegiatan partai politik, dan memantau kegiatan agen-agen masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu
2. **Mengajak Masyarakat Berpartisipasi:** Masyarakat harus diundang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan politik, memberikan informasi terkait dengan visi misi partai politik, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan
3. **Mengawasi Pemilu dengan Transparansi:** Pemilu harus diawasi dengan transparansi yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara jujur dan adil, serta memastikan bahwa informasi terkait dengan pemilu disampaikan secara jelas dan akurat

4. **Mengawasi Pemilu dengan Kesadaran:** Masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi terkait dengan pentingnya pemilu bersih. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan politik dan informasi yang jelas
5. **Mengawasi Pemilu dengan Komitmen:** Pemilu harus diawasi dengan komitmen yang kuat dari semua pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa semua pihak, termasuk penyelenggara dan peserta pemilu, memiliki komitmen untuk menjaga integritas pemilu
6. **Mengawasi Pemilu dengan Sanksi:** Pemilu harus diawasi dengan sanksi yang jelas dan efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa semua pihak yang melanggar aturan pemilu dikenakan sanksi yang sesuai
7. **Mengawasi Pemilu dengan Peran Pemimpin:** Pemimpin harus berperan penting dalam menjaga integritas pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa pemimpin memiliki komitmen untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi dalam proses pemilihan secara jujur
8. **Mengawasi Pemilu dengan Peran Masyarakat:** Masyarakat harus berperan penting dalam menjaga integritas pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terkait dengan pentingnya pemilu bersih dan memastikan bahwa masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan
9. **Mengawasi Pemilu dengan Peran Lembaga:** Lembaga harus berperan penting dalam menjaga integritas pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa lembaga memiliki komitmen untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi dalam proses pemilihan secara jujur
10. **Mengawasi Pemilu dengan Peran Media:** Media harus berperan penting dalam menjaga integritas pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa media memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait dengan pemilu dan memastikan bahwa media tidak melakukan kecurangan dalam proses pemilihan

Di Indonesia salah satu topik yang krusial dalam setiap pemilihan umum (pemilu) adalah menyangkut pengelolaan uang dalam pemilu. Peran dan fungsi uang dalam pemilu adalah sangat penting dalam kajian dalam ilmu politik. Isu ini kemudian membawa berbagai konsekuensi bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan dari sisi pemilih sehingga fenomena maraknya praktek politik uang juga menjadi isu utama dalam penyelenggaraan setiap pemilu.

4. KESIMPULAN

Pemilihan umum tidak saja dimaknai sebagai ajang perebutan kekuasaan semata. Namun juga sebagai tempat bagi rakyat untuk menunjukkan partisipasi politiknya. Pemilu berkualitas dapat terwujud jika prosesnya dijaga, dipantau, dan diawasi agar tidak dicurangi. Pemantauan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Proses pemantauan dilaksanakan dari awal hingga akhir yaitu penetapan hasil pemilu.

Program Kawal Pemilu Bersih yang diikuti oleh kaliber kelompok 11 telah membawa beberapa kesimpulan penting dan Melalui program ini, anggota kelompok 11 semakin menyadari pentingnya pemilu bersih bagi demokrasi dan stabilitas politik. Kolaborasi antara anggota kelompok 11 dan pihak BAWASLU. Melalui pengalaman dalam program ini, kelompok 11 mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas pemilu, termasuk intimidasi, money politics, dan kecurangan teknis.

Proses kawal pemilu di Kecamatan Mungka juga mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan yang bersih dan adil bagi masa depan demokrasi. Edukasi mengenai hak suara, tata cara pemilihan, dan peran pengawasan telah memberikan dampak positif dalam membentuk kesadaran politik masyarakat. Dengan demikian, kesimpulan kawal pemilu bersih di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah sebuah cerminan dari komitmen bersama untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan integritas dan keadilan. Meskipun tantangan selalu ada, namun dengan kerjasama dan kesadaran yang terus-menerus, demokrasi di wilayah ini dapat terus berkembang dan menghasilkan pemimpin yang dipilih secara sah oleh rakyatnya.

5. SARAN

Berdasarkan simpulan hasil Kawal Pemilu Bersih ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang telah dilaksanakan memberikan suatu pengalaman yang baru bagi kami di Nagari Mungka, Kec.Mungka, Kab.Lima Puluh Kota. Semoga kegiatan ini tetap berlanjut dalam 5 tahun sekali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan Terimakasih atas kontribusi teman-teman dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam mendukung kawal pemilu bersih melalui jurnal ini. Partisipasi Kelompok 11 dan DPL tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang pentingnya pemilu yang adil dan bersih, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat akan peran kritis pemantauan dalam menjaga integritas demokrasi. Jurnal ini bukan hanya sebuah kumpulan data atau analisis, tetapi juga sebuah cerminan dari semangat dan dedikasi Teman-teman dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang mendasar. Semoga tulisan ini menjadi panduan bagi banyak individu dan lembaga dalam upaya untuk mencapai pemilu yang lebih transparan dan adil di masa depan. Kami menghargai kerja keras Kelompok ini dalam memperkuat demokrasi dan menginspirasi perubahan positif dalam sistem pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvons, M. (2018). *KEBEBASAN KEAMANAN, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum untuk Stabilitas Negara*. 15.
- Aryani, N. P., Fathama, A., Solehudin, A., & Rofina, H. M. (2024). *Perbandingan Konsep Demokrasi dalam Teori Perkembangan Filsafat dengan Relevansi Menjelang Pemilu 2024*.
Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi. (2021). 1(2).
- Bachtiar, F. R. (2014). *PEMILU INDONESIA: KIBLAT NEGARA DEMOKRASI DARI BERBAGAI REPRESENTASI*. 3.
- Bestari, M. (2018). *PENATAAN SISTEM PEMILU MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI WUJUD PENGHORMATAN KEDAULATAN RAKYAT*.
- Budiarti, T. (2018). *PEMILU DI INDONESIA*. Sinar Grafika.
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A. (2024). *Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. 8(1).
- Jimly Asshiddiqie Et Al., S. I. (2014). *PEMILIHAN UMUM SERENTAK*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Kelly, N., & Ashiagbo, S. (2011). *Political Parties And Democracy In Theoretical And Practical Perspectives: Parliamentary Groups*. National Democratic Institute For International Affairs.
- Kenyataan, D. (2014). *INDONESIA REPORT 2014*.
- Noviati, C. E. (2013). *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan*. 10.
- Pendidikan Dan Pemberantasan Korupsi. (N.D.). *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 06(1).
- Pratama Putri, M. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 Di Kalimantan Timur. *Journal Ilmu Komunikasi*, 4(1).
- Setyowati, S. A. E., & Hariyati, H. (2022). Analisis Reaksi Pasar Modal Pada Peristiwa Politik Pemilihan Umum Di Indonesia, Malaysia, Dan Thailand: Keywords: General Election; Abnormal Return; Trading Volume Activity. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 10(2), 46–56.
<https://doi.org/10.26740/Akunesa.V10n2.P46-56>
- Sholahuddin, A. H., & Bariah, C. (N.D.). *HUKUM PEMILU DI INDONESIA*.
- Sunny, I. (1984). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Aksara Baru.
- Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* (Cetakan Pertama). (2019). Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- UU No.7 Tahun 2017 (2).Pdf*. (N.D.).
- Zitri, I., Rifaid, R., & Darmansyah, D. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Kepada Masyarakat Guna Menciptakan Masyarakat Yang Sadar Pemilu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1648–1653.
<https://doi.org/10.59837/Jpmba.V1i8.400>